

KEKUASAAN, KAPITAL, DAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM DUNIA KONTEMPORER

TELAAH EKONOMI POLITIK ZAMAN KINI



EKONOMI POLITIK KONTEMPORER

Kekuasaan, Kapital, dan Kebijakan Publik dalam Dunia Kontemporer

*Telaah Ekonomi Politik atas Institusi, Oligarki, Teknologi,
dan Agenda Demokratisasi Kebijakan*

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Bogor, 2026

Abstrak

Artikel ini menganalisis hubungan timbal balik antara kekuasaan, kapital, dan kebijakan publik dalam dunia kontemporer. Berangkat dari ekonomi politik institusional dan kritis, pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan bukan hasil kalkulasi teknis yang netral, melainkan arena tempat kepentingan, gagasan, organisasi, dan ketimpangan sumber daya berkompetisi. Konsentrasi kekayaan dapat dikonversi menjadi pengaruh melalui pembiayaan politik, lobi, kepemilikan media, produksi pengetahuan, kekuasaan pasar, dan ketergantungan struktural negara pada investasi. Namun negara tidak diperlakukan sekadar sebagai instrumen kapital: otonomi relatif, kapasitas administratif, aturan hukum, dan koalisi sosial dapat memungkinkan negara mendisiplinkan rente serta mengarahkan transformasi. Artikel juga mengulas finansialisasi, platform digital dan AI, krisis iklim, tata kelola global, serta dinamika Indonesia. Argumen akhirnya ialah bahwa demokratisasi politik harus dilengkapi demokratisasi ekonomi dan pengetahuan. Kebijakan publik yang berkeadaban memerlukan transparansi substantif, partisipasi bermakna, kompetisi yang sehat, kapasitas negara, perlindungan sosial, serta mekanisme koreksi yang menjadikan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: kekuasaan; kapital; kebijakan publik; ekonomi politik; oligarki; regulatory capture; finansialisasi; platform digital; demokrasi; Indonesia.

Daftar Isi

1. Pendahuluan: Tiga Ranah yang Saling Membentuk
2. Fondasi Teoretis: Dari Marx, Weber, Gramsci hingga Bourdieu
3. Arsitektur Kapitalisme Kontemporer
4. Konsentrasi Kekayaan, Oligarki, dan Ketimpangan Politik
5. Negara, Otonomi Relatif, dan Kapasitas Administratif
6. Siklus Kebijakan sebagai Arena Kekuasaan
7. Regulatory Capture, Lobi, dan Pintu Putar
8. Finansialisasi dan Kekuasaan Pasar
9. Platform Digital, Data, dan Kecerdasan Artifisial
10. Media, Pengetahuan, dan Politik Kebenaran
11. Krisis Iklim, Ekstraktivisme, dan Transisi Energi
12. Global South, Ruang Kebijakan, dan Tata Kelola Global
13. Indonesia: Demokratisasi, Desentralisasi, dan Politik Pembangunan
14. Dampak terhadap Manajemen dan Tata Kelola Organisasi
15. Agenda Reformasi: Demokratisasi Negara dan Ekonomi
16. Penutup: Menuju Kebijakan Publik yang Berkeadaban
17. Glossarium
18. Daftar Pustaka

1. Pendahuluan: Tiga Ranah yang Saling Membentuk

Gagasan utama bagian ini ialah bahwa kekuasaan, kapital, dan kebijakan publik bukanlah tiga wilayah yang berdiri sendiri, melainkan satu konfigurasi hubungan sosial yang menentukan siapa memperoleh sumber daya, risiko, pengakuan, dan masa depan. Dalam analisis ekonomi politik, hasil sosial tidak cukup diterangkan oleh preferensi individual atau efisiensi pasar. Hasil tersebut lahir dari aturan kepemilikan, kapasitas organisasi, sejarah institusi, dan distribusi daya tawar. Karena itu, kebijakan publik harus dibaca sebagai tindakan substantif sekaligus simbolik: ia mengalokasikan sumber daya, menetapkan kategori yang sah, dan menyampaikan siapa yang dianggap layak dibantu. Cara pandang ini tidak menolak pengetahuan teknis. Sebaliknya, ia menempatkan teknik di dalam proses demokratis agar asumsi, ketidakpastian, dan konsekuensi distribusionalnya dapat diuji secara terbuka.

Mekanisme yang penting terlihat pada kenyataan bahwa keputusan pajak, subsidi, izin usaha, perlindungan tenaga kerja, penggunaan data, serta pembiayaan transisi energi selalu membagikan manfaat dan beban secara tidak simetris. Penerima manfaat biasanya terkonsentrasi dan mempunyai insentif kuat untuk mengorganisasi diri, sedangkan biaya sering tersebar pada jutaan warga atau baru tampak pada masa depan. Asimetri tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang secara agregat merugikan dapat bertahan lama. Kelompok terorganisasi memiliki staf, data, waktu, jaringan hukum, dan akses media; warga biasa menghadapi biaya informasi serta koordinasi. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara belum otomatis menghasilkan pengaruh yang setara. Demokrasi memerlukan infrastruktur partisipasi yang mengurangi biaya kolektif dan menjamin bahwa pihak terdampak dapat memasuki proses kebijakan.

Secara analitis, perdebatan kontemporer perlu bergerak dari pertanyaan teknis mengenai kebijakan yang efisien menuju pertanyaan politik mengenai kepentingan siapa yang diutamakan, suara siapa yang dipercaya, dan alternatif apa yang dikeluarkan dari agenda. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Lukes (2005) bahwa kekuasaan bekerja dalam keputusan, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi. Ia juga berhubungan dengan konsep ketergantungan struktural negara pada investasi: bahkan tanpa instruksi langsung, pembuat kebijakan mengantisipasi reaksi pasar, peringkat kredit, atau keputusan perusahaan. Antisipasi dapat rasional, tetapi menjadi problematis bila satu jenis risiko—misalnya turunnya kepercayaan investor—selalu diprioritaskan dibanding risiko pengangguran, kemiskinan, hilangnya ruang hidup, atau kerusakan ekologis. Audit kebijakan karenanya harus memeriksa risiko siapa yang dihitung dan siapa yang tidak terlihat.

Sebuah ilustrasi relevan adalah Indonesia, sebagaimana banyak negara demokrasi berkembang, menghadapi tuntutan pertumbuhan cepat sekaligus kewajiban memperluas kesejahteraan, menjaga lingkungan, dan mempertahankan ruang demokratis. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan output atau kecepatan realisasi. Penilaian perlu mencakup additionality, distribusi manfaat, kualitas pekerjaan, ketahanan fiskal, dampak lingkungan, hak komunitas, dan kemampuan belajar. Kebijakan yang menghasilkan investasi besar tetapi menciptakan monopoli, ketergantungan teknologi, atau biaya pemulihan publik mungkin tampak berhasil

dalam jangka pendek namun rapuh secara institusional. Sebaliknya, prosedur yang lebih deliberatif dapat memerlukan waktu, tetapi meningkatkan informasi lokal, legitimasi, dan kepatuhan.

Implikasi kelembagaannya adalah perlunya kombinasi antara batas, penyeimbang, dan kapasitas. Batas mencegah konsentrasi melalui aturan persaingan, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik. Penyeimbang memperkuat serikat pekerja, organisasi warga, jurnalisme, akademika, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan. Kapasitas memberi negara tenaga ahli, sistem data, anggaran, serta kesinambungan organisasi untuk bertindak independen. Ketiganya saling bergantung. Larangan tanpa kapasitas mudah menjadi simbolik; kapasitas tanpa pengawasan dapat represif; partisipasi tanpa informasi dan tindak lanjut berubah menjadi ritual konsultasi.

Dengan demikian, ukuran normatif yang tepat bukan ketiadaan kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diperebutkan secara damai. Institusi yang demokratis tidak menjanjikan keputusan sempurna, tetapi menyediakan kemungkinan untuk mengetahui kesalahan, mengganti pemimpin, memperbaiki aturan, dan memberi pemulihan. Prinsip ini relevan bagi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi internasional. Setiap pusat keputusan yang mampu memengaruhi kehidupan publik perlu tunduk pada kewajiban penjelasan, pemeriksaan independen, partisipasi pihak terdampak, serta sanksi yang proporsional. Tanpa itu, efisiensi mudah menjadi nama lain bagi pemindahan biaya kepada mereka yang paling lemah.

2. Fondasi Teoretis: Dari Marx, Weber, Gramsci hingga Bourdieu

Gagasan utama bagian ini ialah bahwa tradisi Marxian membaca kapital sebagai relasi sosial yang memungkinkan pemilik sarana produksi mengendalikan surplus, sedangkan Weber menambahkan arti penting kewenangan legal, birokrasi, status, dan organisasi. Dalam analisis ekonomi politik, hasil sosial tidak cukup diterangkan oleh preferensi individual atau efisiensi pasar. Hasil tersebut lahir dari aturan kepemilikan, kapasitas organisasi, sejarah institusi, dan distribusi daya tawar. Karena itu, kebijakan publik harus dibaca sebagai tindakan substantif sekaligus simbolik: ia mengalokasikan sumber daya, menetapkan kategori yang sah, dan menyampaikan siapa yang dianggap layak dibantu. Cara pandang ini tidak menolak pengetahuan teknis. Sebaliknya, ia menempatkan teknik di dalam proses demokratis agar asumsi, ketidakpastian, dan konsekuensi distribusionalnya dapat diuji secara terbuka.

Mekanisme yang penting terlihat pada kenyataan bahwa Gramsci menjelaskan hegemoni sebagai kepemimpinan moral-intelektual yang membuat tatanan tertentu diterima sebagai kewajiban, sementara Bourdieu menunjukkan kemampuan kapital ekonomi untuk dikonversi menjadi kapital sosial, budaya, dan simbolik. Penerima manfaat biasanya terkonsentrasi dan mempunyai insentif kuat untuk mengorganisasi diri, sedangkan biaya sering tersebar pada jutaan warga atau baru tampak pada masa depan. Asimetri tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang secara agregat merugikan dapat bertahan lama. Kelompok terorganisasi memiliki staf, data, waktu, jaringan hukum, dan akses media; warga biasa menghadapi biaya informasi serta koordinasi. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara belum otomatis menghasilkan pengaruh yang setara. Demokrasi memerlukan infrastruktur partisipasi yang mengurangi biaya kolektif dan menjamin bahwa pihak terdampak dapat memasuki proses kebijakan.

Secara analitis, gabungan perspektif tersebut menghindarkan analisis dari reduksionisme ekonomi maupun anggapan bahwa negara sepenuhnya netral. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Lukes (2005) bahwa kekuasaan bekerja dalam keputusan, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi. Ia juga berhubungan dengan konsep ketergantungan struktural negara pada investasi: bahkan tanpa instruksi langsung, pembuat kebijakan mengantisipasi reaksi pasar, peringkat kredit, atau keputusan perusahaan. Antisipasi dapat rasional, tetapi menjadi problematis bila satu jenis risiko—misalnya turunnya kepercayaan investor—selalu diprioritaskan dibanding risiko pengangguran, kemiskinan, hilangnya ruang hidup, atau kerusakan ekologis. Audit kebijakan karenanya harus memeriksa risiko siapa yang dihitung dan siapa yang tidak terlihat.

Sebuah ilustrasi relevan adalah seorang pengusaha tidak otomatis menguasai kebijakan, tetapi sumber daya finansial, jaringan, kredibilitas profesional, dan akses komunikasi dapat diubah menjadi kapasitas penetapan agenda. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan output atau kecepatan realisasi. Penilaian perlu mencakup additionality, distribusi manfaat, kualitas pekerjaan, ketahanan fiskal, dampak lingkungan, hak komunitas, dan kemampuan belajar. Kebijakan yang menghasilkan investasi besar tetapi menciptakan monopoli, ketergantungan teknologi, atau biaya pemulihan publik mungkin tampak berhasil dalam jangka pendek namun rapuh secara institusional. Sebaliknya, prosedur yang lebih deliberatif dapat memerlukan waktu, tetapi meningkatkan informasi lokal, legitimasi, dan kepatuhan.

Implikasi kelembagaannya adalah perlunya kombinasi antara batas, penyeimbang, dan kapasitas. Batas mencegah konsentrasi melalui aturan persaingan, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik. Penyeimbang memperkuat serikat pekerja, organisasi warga, jurnalisme, akademika, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan. Kapasitas memberi negara tenaga ahli, sistem data, anggaran, serta kesinambungan organisasi untuk bertindak independen. Ketiganya saling bergantung. Larangan tanpa kapasitas mudah menjadi simbolik; kapasitas tanpa pengawasan dapat represif; partisipasi tanpa informasi dan tindak lanjut berubah menjadi ritual konsultasi.

Dengan demikian, ukuran normatif yang tepat bukan ketiadaan kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diperebutkan secara damai. Institusi yang demokratis tidak menjanjikan keputusan sempurna, tetapi menyediakan kemungkinan untuk mengetahui kesalahan, mengganti pemimpin, memperbaiki aturan, dan memberi pemulihan. Prinsip ini relevan bagi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi internasional. Setiap pusat keputusan yang mampu memengaruhi kehidupan publik perlu tunduk pada kewajiban penjelasan, pemeriksaan independen, partisipasi pihak terdampak, serta sanksi yang proporsional. Tanpa itu, efisiensi mudah menjadi nama lain bagi pemindahan biaya kepada mereka yang paling lemah.

3. Arsitektur Kapitalisme Kontemporer

Gagasan utama bagian ini ialah bahwa kapitalisme masa kini ditandai oleh rantai nilai global, korporasi transnasional, kepemilikan aset tidak berwujud, dominasi pembiayaan, dan ketergantungan negara pada investasi privat. Dalam analisis ekonomi politik, hasil sosial tidak cukup diterangkan oleh preferensi

individual atau efisiensi pasar. Hasil tersebut lahir dari aturan kepemilikan, kapasitas organisasi, sejarah institusi, dan distribusi daya tawar. Karena itu, kebijakan publik harus dibaca sebagai tindakan substantif sekaligus simbolik: ia mengalokasikan sumber daya, menetapkan kategori yang sah, dan menyampaikan siapa yang dianggap layak dibantu. Cara pandang ini tidak menolak pengetahuan teknis. Sebaliknya, ia menempatkan teknik di dalam proses demokratis agar asumsi, ketidakpastian, dan konsekuensi distribusionalnya dapat diuji secara terbuka.

Mekanisme yang penting terlihat pada kenyataan bahwa mobilitas modal jauh lebih cepat daripada mobilitas pekerja dan kapasitas regulasi, sehingga pemerintah sering berkompetisi menawarkan insentif, deregulasi, atau jaminan untuk mempertahankan investasi. Penerima manfaat biasanya terkonsentrasi dan mempunyai insentif kuat untuk mengorganisasi diri, sedangkan biaya sering tersebar pada jutaan warga atau baru tampak pada masa depan. Asimetri tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang secara agregat merugikan dapat bertahan lama. Kelompok terorganisasi memiliki staf, data, waktu, jaringan hukum, dan akses media; warga biasa menghadapi biaya informasi serta koordinasi. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara belum otomatis menghasilkan pengaruh yang setara. Demokrasi memerlukan infrastruktur partisipasi yang mengurangi biaya kolektif dan menjamin bahwa pihak terdampak dapat memasuki proses kebijakan.

Secara analitis, struktur ini menghasilkan paradoks: negara tetap diperlukan untuk menjaga kontrak, infrastruktur, stabilitas, dan penyelamatan krisis, tetapi legitimasi intervensinya sering dibatasi oleh narasi pasar bebas. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Lukes (2005) bahwa kekuasaan bekerja dalam keputusan, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi. Ia juga berhubungan dengan konsep ketergantungan struktural negara pada investasi: bahkan tanpa instruksi langsung, pembuat kebijakan mengantisipasi reaksi pasar, peringkat kredit, atau keputusan perusahaan. Antisipasi dapat rasional, tetapi menjadi problematis bila satu jenis risiko—misalnya turunnya kepercayaan investor—selalu diprioritaskan dibanding risiko pengangguran, kemiskinan, hilangnya ruang hidup, atau kerusakan ekologis. Audit kebijakan karenanya harus memeriksa risiko siapa yang dihitung dan siapa yang tidak terlihat.

Sebuah ilustrasi relevan adalah krisis finansial, pandemi, gangguan rantai pasok, dan konflik geopolitik menunjukkan bahwa pasar tidak pernah bekerja tanpa institusi publik yang menanggung ketidakpastian sistemik. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan output atau kecepatan realisasi. Penilaian perlu mencakup additionality, distribusi manfaat, kualitas pekerjaan, ketahanan fiskal, dampak lingkungan, hak komunitas, dan kemampuan belajar. Kebijakan yang menghasilkan investasi besar tetapi menciptakan monopoli, ketergantungan teknologi, atau biaya pemulihan publik mungkin tampak berhasil dalam jangka pendek namun rapuh secara institusional. Sebaliknya, prosedur yang lebih deliberatif dapat memerlukan waktu, tetapi meningkatkan informasi lokal, legitimasi, dan kepatuhan.

Implikasi kelembagaannya adalah perlunya kombinasi antara batas, penyeimbang, dan kapasitas. Batas mencegah konsentrasi melalui aturan persaingan, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik. Penyeimbang memperkuat serikat pekerja, organisasi warga, jurnalisme, akademika, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan. Kapasitas memberi negara tenaga ahli, sistem data, anggaran, serta

kesinambungan organisasi untuk bertindak independen. Ketiganya saling bergantung. Larangan tanpa kapasitas mudah menjadi simbolik; kapasitas tanpa pengawasan dapat represif; partisipasi tanpa informasi dan tindak lanjut berubah menjadi ritual konsultasi.

Dengan demikian, ukuran normatif yang tepat bukan ketiadaan kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diperebutkan secara damai. Institusi yang demokratis tidak menjanjikan keputusan sempurna, tetapi menyediakan kemungkinan untuk mengetahui kesalahan, mengganti pemimpin, memperbaiki aturan, dan memberi pemulihan. Prinsip ini relevan bagi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi internasional. Setiap pusat keputusan yang mampu memengaruhi kehidupan publik perlu tunduk pada kewajiban penjelasan, pemeriksaan independen, partisipasi pihak terdampak, serta sanksi yang proporsional. Tanpa itu, efisiensi mudah menjadi nama lain bagi pemindahan biaya kepada mereka yang paling lemah.

4. Konsentrasi Kekayaan, Oligarki, dan Ketimpangan Politik

Gagasan utama bagian ini ialah bahwa ketimpangan ekonomi menjadi ketimpangan politik ketika kekayaan dapat membeli kedekatan dengan pengambil keputusan, membiayai kampanye, menguasai media, mendanai produksi pengetahuan, atau menunda penegakan aturan. Dalam analisis ekonomi politik, hasil sosial tidak cukup diterangkan oleh preferensi individual atau efisiensi pasar. Hasil tersebut lahir dari aturan kepemilikan, kapasitas organisasi, sejarah institusi, dan distribusi daya tawar. Karena itu, kebijakan publik harus dibaca sebagai tindakan substantif sekaligus simbolik: ia mengalokasikan sumber daya, menetapkan kategori yang sah, dan menyampaikan siapa yang dianggap layak dibantu. Cara pandang ini tidak menolak pengetahuan teknis. Sebaliknya, ia menempatkan teknik di dalam proses demokratis agar asumsi, ketidakpastian, dan konsekuensi distribusionalnya dapat diuji secara terbuka.

Mekanisme yang penting terlihat pada kenyataan bahwa oligarki tidak harus berarti konspirasi kecil yang seragam; ia dapat beroperasi sebagai koalisi cair di antara pemilik modal, elite partai, pejabat, broker, dan profesional yang bertemu pada perlindungan aset. Penerima manfaat biasanya terkonsentrasi dan mempunyai insentif kuat untuk mengorganisasi diri, sedangkan biaya sering tersebar pada jutaan warga atau baru tampak pada masa depan. Asimetri tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang secara agregat merugikan dapat bertahan lama. Kelompok terorganisasi memiliki staf, data, waktu, jaringan hukum, dan akses media; warga biasa menghadapi biaya informasi serta koordinasi. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara belum otomatis menghasilkan pengaruh yang setara. Demokrasi memerlukan infrastruktur partisipasi yang mengurangi biaya kolektif dan menjamin bahwa pihak terdampak dapat memasuki proses kebijakan.

Secara analitis, demokrasi prosedural dapat tetap menyelenggarakan pemilu sambil mengalami penyempitan pilihan substantif karena hampir semua kontestan bergantung pada sumber pembiayaan yang sama. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Lukes (2005) bahwa kekuasaan bekerja dalam keputusan, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi. Ia juga berhubungan dengan konsep ketergantungan struktural negara pada investasi: bahkan tanpa instruksi langsung, pembuat kebijakan mengantisipasi reaksi pasar, peringkat kredit, atau keputusan perusahaan. Antisipasi dapat rasional,

tetapi menjadi problematis bila satu jenis risiko—misalnya turunnya kepercayaan investor—selalu diprioritaskan dibanding risiko pengangguran, kemiskinan, hilangnya ruang hidup, atau kerusakan ekologis. Audit kebijakan karenanya harus memeriksa risiko siapa yang dihitung dan siapa yang tidak terlihat.

Sebuah ilustrasi relevan adalah tantangannya ialah membedakan keberhasilan bisnis yang sah dari penggunaan kekayaan untuk memperoleh hak istimewa, rente, kekebalan, dan kemampuan memindahkan biaya kepada publik. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan output atau kecepatan realisasi. Penilaian perlu mencakup *additionality*, distribusi manfaat, kualitas pekerjaan, ketahanan fiskal, dampak lingkungan, hak komunitas, dan kemampuan belajar. Kebijakan yang menghasilkan investasi besar tetapi menciptakan monopoli, ketergantungan teknologi, atau biaya pemulihan publik mungkin tampak berhasil dalam jangka pendek namun rapuh secara institusional. Sebaliknya, prosedur yang lebih deliberatif dapat memerlukan waktu, tetapi meningkatkan informasi lokal, legitimasi, dan kepatuhan.

Implikasi kelembagaannya adalah perlunya kombinasi antara batas, penyeimbang, dan kapasitas. Batas mencegah konsentrasi melalui aturan persaingan, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik. Penyeimbang memperkuat serikat pekerja, organisasi warga, jurnalisme, akademika, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan. Kapasitas memberi negara tenaga ahli, sistem data, anggaran, serta kesinambungan organisasi untuk bertindak independen. Ketiganya saling bergantung. Larangan tanpa kapasitas mudah menjadi simbolik; kapasitas tanpa pengawasan dapat represif; partisipasi tanpa informasi dan tindak lanjut berubah menjadi ritual konsultasi.

Dengan demikian, ukuran normatif yang tepat bukan ketiadaan kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diperebutkan secara damai. Institusi yang demokratis tidak menjanjikan keputusan sempurna, tetapi menyediakan kemungkinan untuk mengetahui kesalahan, mengganti pemimpin, memperbaiki aturan, dan memberi pemulihan. Prinsip ini relevan bagi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi internasional. Setiap pusat keputusan yang mampu memengaruhi kehidupan publik perlu tunduk pada kewajiban penjelasan, pemeriksaan independen, partisipasi pihak terdampak, serta sanksi yang proporsional. Tanpa itu, efisiensi mudah menjadi nama lain bagi pemindahan biaya kepada mereka yang paling lemah.

5. Negara, Otonomi Relatif, dan Kapasitas Administratif

Gagasan utama bagian ini ialah bahwa negara bukan sekadar instrumen kapital, tetapi juga bukan wasit yang steril; lembaga publik memiliki otonomi relatif yang bergantung pada kapasitas birokrasi, aturan hukum, basis pajak, koalisi sosial, dan legitimasi. Dalam analisis ekonomi politik, hasil sosial tidak cukup diterangkan oleh preferensi individual atau efisiensi pasar. Hasil tersebut lahir dari aturan kepemilikan, kapasitas organisasi, sejarah institusi, dan distribusi daya tawar. Karena itu, kebijakan publik harus dibaca sebagai tindakan substantif sekaligus simbolik: ia mengalokasikan sumber daya, menetapkan kategori yang sah, dan menyampaikan siapa yang dianggap layak dibantu. Cara pandang ini tidak menolak

pengetahuan teknis. Sebaliknya, ia menempatkan teknik di dalam proses demokratis agar asumsi, ketidakpastian, dan konsekuensi distribusionalnya dapat diuji secara terbuka.

Mekanisme yang penting terlihat pada kenyataan bahwa birokrasi yang profesional dapat membatasi kepentingan sempit, namun profesionalisme tanpa akuntabilitas dapat berubah menjadi teknokrasi yang menutup partisipasi. Penerima manfaat biasanya terkonsentrasi dan mempunyai insentif kuat untuk mengorganisasi diri, sedangkan biaya sering tersebar pada jutaan warga atau baru tampak pada masa depan. Asimetri tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang secara agregat merugikan dapat bertahan lama. Kelompok terorganisasi memiliki staf, data, waktu, jaringan hukum, dan akses media; warga biasa menghadapi biaya informasi serta koordinasi. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara belum otomatis menghasilkan pengaruh yang setara. Demokrasi memerlukan infrastruktur partisipasi yang mengurangi biaya kolektif dan menjamin bahwa pihak terdampak dapat memasuki proses kebijakan.

Secara analitis, kapasitas negara mencakup kemampuan memperoleh informasi, memungut penerimaan, mengoordinasikan aktor, menegakkan regulasi, mengevaluasi program, dan belajar dari kegagalan. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Lukes (2005) bahwa kekuasaan bekerja dalam keputusan, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi. Ia juga berhubungan dengan konsep ketergantungan struktural negara pada investasi: bahkan tanpa instruksi langsung, pembuat kebijakan mengantisipasi reaksi pasar, peringkat kredit, atau keputusan perusahaan. Antisipasi dapat rasional, tetapi menjadi problematis bila satu jenis risiko—misalnya turunnya kepercayaan investor—selalu diprioritaskan dibanding risiko pengangguran, kemiskinan, hilangnya ruang hidup, atau kerusakan ekologis. Audit kebijakan karenanya harus memeriksa risiko siapa yang dihitung dan siapa yang tidak terlihat.

Sebuah ilustrasi relevan adalah negara pembangunan yang efektif mensyaratkan kedekatan tertanam dengan pelaku ekonomi untuk memperoleh informasi sekaligus jarak kelembagaan agar tidak ditangkap oleh mereka. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan output atau kecepatan realisasi. Penilaian perlu mencakup *additionality*, distribusi manfaat, kualitas pekerjaan, ketahanan fiskal, dampak lingkungan, hak komunitas, dan kemampuan belajar. Kebijakan yang menghasilkan investasi besar tetapi menciptakan monopoli, ketergantungan teknologi, atau biaya pemulihan publik mungkin tampak berhasil dalam jangka pendek namun rapuh secara institusional. Sebaliknya, prosedur yang lebih deliberatif dapat memerlukan waktu, tetapi meningkatkan informasi lokal, legitimasi, dan kepatuhan.

Implikasi kelembagaannya adalah perlunya kombinasi antara batas, penyeimbang, dan kapasitas. Batas mencegah konsentrasi melalui aturan persaingan, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik. Penyeimbang memperkuat serikat pekerja, organisasi warga, jurnalisme, akademika, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan. Kapasitas memberi negara tenaga ahli, sistem data, anggaran, serta kesinambungan organisasi untuk bertindak independen. Ketiganya saling bergantung. Larangan tanpa kapasitas mudah menjadi simbolik; kapasitas tanpa pengawasan dapat represif; partisipasi tanpa informasi dan tindak lanjut berubah menjadi ritual konsultasi.

Dengan demikian, ukuran normatif yang tepat bukan ketiadaan kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diperebutkan secara damai. Institusi yang demokratis tidak

menjanjikan keputusan sempurna, tetapi menyediakan kemungkinan untuk mengetahui kesalahan, mengganti pemimpin, memperbaiki aturan, dan memberi pemulihan. Prinsip ini relevan bagi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi internasional. Setiap pusat keputusan yang mampu memengaruhi kehidupan publik perlu tunduk pada kewajiban penjelasan, pemeriksaan independen, partisipasi pihak terdampak, serta sanksi yang proporsional. Tanpa itu, efisiensi mudah menjadi nama lain bagi pemindahan biaya kepada mereka yang paling lemah.

6. Siklus Kebijakan sebagai Arena Kekuasaan

Gagasan utama bagian ini ialah bahwa model siklus kebijakan—penetapan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi—berguna sebagai peta, tetapi praktik sesungguhnya tidak linear dan dipenuhi negosiasi. Dalam analisis ekonomi politik, hasil sosial tidak cukup diterangkan oleh preferensi individual atau efisiensi pasar. Hasil tersebut lahir dari aturan kepemilikan, kapasitas organisasi, sejarah institusi, dan distribusi daya tawar. Karena itu, kebijakan publik harus dibaca sebagai tindakan substantif sekaligus simbolik: ia mengalokasikan sumber daya, menetapkan kategori yang sah, dan menyampaikan siapa yang dianggap layak dibantu. Cara pandang ini tidak menolak pengetahuan teknis. Sebaliknya, ia menempatkan teknik di dalam proses demokratis agar asumsi, ketidakpastian, dan konsekuensi distribusionalnya dapat diuji secara terbuka.

Mekanisme yang penting terlihat pada kenyataan bahwa kekuasaan bekerja paling kuat sebelum pemungutan suara, yakni ketika suatu masalah diberi nama, data tertentu dianggap sah, tenggat diciptakan, dan pilihan alternatif disaring. Penerima manfaat biasanya terkonsentrasi dan mempunyai insentif kuat untuk mengorganisasi diri, sedangkan biaya sering tersebar pada jutaan warga atau baru tampak pada masa depan. Asimetri tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang secara agregat merugikan dapat bertahan lama. Kelompok terorganisasi memiliki staf, data, waktu, jaringan hukum, dan akses media; warga biasa menghadapi biaya informasi serta koordinasi. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara belum otomatis menghasilkan pengaruh yang setara. Demokrasi memerlukan infrastruktur partisipasi yang mengurangi biaya kolektif dan menjamin bahwa pihak terdampak dapat memasuki proses kebijakan.

Secara analitis, implementasi bukan tahap administratif yang netral karena petugas garis depan, pemerintah daerah, kontraktor, dan penerima manfaat menafsirkan aturan dalam kondisi sumber daya yang berbeda. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Lukes (2005) bahwa kekuasaan bekerja dalam keputusan, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi. Ia juga berhubungan dengan konsep ketergantungan struktural negara pada investasi: bahkan tanpa instruksi langsung, pembuat kebijakan mengantisipasi reaksi pasar, peringkat kredit, atau keputusan perusahaan. Antisipasi dapat rasional, tetapi menjadi problematis bila satu jenis risiko—misalnya turunnya kepercayaan investor—selalu diprioritaskan dibanding risiko pengangguran, kemiskinan, hilangnya ruang hidup, atau kerusakan ekologis. Audit kebijakan karenanya harus memeriksa risiko siapa yang dihitung dan siapa yang tidak terlihat.

Sebuah ilustrasi relevan adalah evaluasi pun politis: indikator yang dipilih dapat menonjolkan pertumbuhan agregat tetapi menyembunyikan distribusi, kerja perawatan, kerusakan ekologis, atau pengalaman kelompok rentan. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan output atau kecepatan realisasi. Penilaian perlu mencakup additionality, distribusi manfaat, kualitas pekerjaan, ketahanan fiskal, dampak lingkungan, hak komunitas, dan kemampuan belajar. Kebijakan yang menghasilkan investasi besar tetapi menciptakan monopoli, ketergantungan teknologi, atau biaya pemulihan publik mungkin tampak berhasil dalam jangka pendek namun rapuh secara institusional. Sebaliknya, prosedur yang lebih deliberatif dapat memerlukan waktu, tetapi meningkatkan informasi lokal, legitimasi, dan kepatuhan.

Implikasi kelembagaannya adalah perlunya kombinasi antara batas, penyeimbang, dan kapasitas. Batas mencegah konsentrasi melalui aturan persaingan, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik. Penyeimbang memperkuat serikat pekerja, organisasi warga, jurnalisme, akademika, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan. Kapasitas memberi negara tenaga ahli, sistem data, anggaran, serta kesinambungan organisasi untuk bertindak independen. Ketiganya saling bergantung. Larangan tanpa kapasitas mudah menjadi simbolik; kapasitas tanpa pengawasan dapat represif; partisipasi tanpa informasi dan tindak lanjut berubah menjadi ritual konsultasi.

Dengan demikian, ukuran normatif yang tepat bukan ketiadaan kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diperebutkan secara damai. Institusi yang demokratis tidak menjanjikan keputusan sempurna, tetapi menyediakan kemungkinan untuk mengetahui kesalahan, mengganti pemimpin, memperbaiki aturan, dan memberi pemulihan. Prinsip ini relevan bagi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi internasional. Setiap pusat keputusan yang mampu memengaruhi kehidupan publik perlu tunduk pada kewajiban penjelasan, pemeriksaan independen, partisipasi pihak terdampak, serta sanksi yang proporsional. Tanpa itu, efisiensi mudah menjadi nama lain bagi pemindahan biaya kepada mereka yang paling lemah.

7. Regulatory Capture, Lobi, dan Pintu Putar

Gagasan utama bagian ini ialah bahwa regulatory capture terjadi ketika regulasi yang semestinya melindungi kepentingan publik secara sistematis diblokkan untuk melayani industri atau kelompok yang diawasi. Dalam analisis ekonomi politik, hasil sosial tidak cukup diterangkan oleh preferensi individual atau efisiensi pasar. Hasil tersebut lahir dari aturan kepemilikan, kapasitas organisasi, sejarah institusi, dan distribusi daya tawar. Karena itu, kebijakan publik harus dibaca sebagai tindakan substantif sekaligus simbolik: ia mengalokasikan sumber daya, menetapkan kategori yang sah, dan menyampaikan siapa yang dianggap layak dibantu. Cara pandang ini tidak menolak pengetahuan teknis. Sebaliknya, ia menempatkan teknik di dalam proses demokratis agar asumsi, ketidakpastian, dan konsekuensi distribusionalnya dapat diuji secara terbuka.

Mekanisme yang penting terlihat pada kenyataan bahwa mekanismenya mencakup ketimpangan informasi, intensitas lobi, ketergantungan anggaran, ancaman relokasi investasi, pendanaan politik, litigasi strategis, dan perpindahan personel antara regulator dan perusahaan. Penerima manfaat biasanya

terkonsentrasi dan mempunyai insentif kuat untuk mengorganisasi diri, sedangkan biaya sering tersebar pada jutaan warga atau baru tampak pada masa depan. Asimetri tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang secara agregat merugikan dapat bertahan lama. Kelompok terorganisasi memiliki staf, data, waktu, jaringan hukum, dan akses media; warga biasa menghadapi biaya informasi serta koordinasi. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara belum otomatis menghasilkan pengaruh yang setara. Demokrasi memerlukan infrastruktur partisipasi yang mengurangi biaya kolektif dan menjamin bahwa pihak terdampak dapat memasuki proses kebijakan.

Secara analitis, tidak semua konsultasi industri adalah penangkapan; regulator memang membutuhkan pengetahuan teknis, sehingga persoalan utamanya adalah ketimpangan akses, transparansi, dan kemampuan menguji klaim. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Lukes (2005) bahwa kekuasaan bekerja dalam keputusan, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi. Ia juga berhubungan dengan konsep ketergantungan struktural negara pada investasi: bahkan tanpa instruksi langsung, pembuat kebijakan mengantisipasi reaksi pasar, peringkat kredit, atau keputusan perusahaan. Antisipasi dapat rasional, tetapi menjadi problematis bila satu jenis risiko—misalnya turunnya kepercayaan investor—selalu diprioritaskan dibanding risiko pengangguran, kemiskinan, hilangnya ruang hidup, atau kerusakan ekologis. Audit kebijakan karenanya harus memeriksa risiko siapa yang dihitung dan siapa yang tidak terlihat.

Sebuah ilustrasi relevan adalah pencegahan memerlukan registrasi lobi, pengungkapan konflik kepentingan, masa jeda pintu putar, konsultasi publik yang bermakna, analisis dampak distribusional, serta kapasitas riset independen. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan output atau kecepatan realisasi. Penilaian perlu mencakup additionality, distribusi manfaat, kualitas pekerjaan, ketahanan fiskal, dampak lingkungan, hak komunitas, dan kemampuan belajar. Kebijakan yang menghasilkan investasi besar tetapi menciptakan monopoli, ketergantungan teknologi, atau biaya pemulihan publik mungkin tampak berhasil dalam jangka pendek namun rapuh secara institusional. Sebaliknya, prosedur yang lebih deliberatif dapat memerlukan waktu, tetapi meningkatkan informasi lokal, legitimasi, dan kepatuhan.

Implikasi kelembagaannya adalah perlunya kombinasi antara batas, penyeimbang, dan kapasitas. Batas mencegah konsentrasi melalui aturan persaingan, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik. Penyeimbang memperkuat serikat pekerja, organisasi warga, jurnalisme, academia, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan. Kapasitas memberi negara tenaga ahli, sistem data, anggaran, serta kesinambungan organisasi untuk bertindak independen. Ketiganya saling bergantung. Larangan tanpa kapasitas mudah menjadi simbolik; kapasitas tanpa pengawasan dapat represif; partisipasi tanpa informasi dan tindak lanjut berubah menjadi ritual konsultasi.

Dengan demikian, ukuran normatif yang tepat bukan ketiadaan kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diperebutkan secara damai. Institusi yang demokratis tidak menjanjikan keputusan sempurna, tetapi menyediakan kemungkinan untuk mengetahui kesalahan, mengganti pemimpin, memperbaiki aturan, dan memberi pemulihan. Prinsip ini relevan bagi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi internasional. Setiap pusat keputusan yang mampu memengaruhi kehidupan publik perlu tunduk pada kewajiban penjelasan, pemeriksaan independen,

partisipasi pihak terdampak, serta sanksi yang proporsional. Tanpa itu, efisiensi mudah menjadi nama lain bagi pemindahan biaya kepada mereka yang paling lemah.

8. Finansialisasi dan Kekuasaan Pasar

Gagasan utama bagian ini ialah bahwa finansialisasi menggambarkan meningkatnya peran motif, aktor, pasar, dan ukuran finansial dalam keputusan perusahaan, rumah tangga, serta negara. Dalam analisis ekonomi politik, hasil sosial tidak cukup diterangkan oleh preferensi individual atau efisiensi pasar. Hasil tersebut lahir dari aturan kepemilikan, kapasitas organisasi, sejarah institusi, dan distribusi daya tawar. Karena itu, kebijakan publik harus dibaca sebagai tindakan substantif sekaligus simbolik: ia mengalokasikan sumber daya, menetapkan kategori yang sah, dan menyampaikan siapa yang dianggap layak dibantu. Cara pandang ini tidak menolak pengetahuan teknis. Sebaliknya, ia menempatkan teknik di dalam proses demokratis agar asumsi, ketidakpastian, dan konsekuensi distribusionalnya dapat diuji secara terbuka.

Mekanisme yang penting terlihat pada kenyataan bahwa ketika nilai pemegang saham jangka pendek mendominasi, laba dapat dialihkan ke dividen, pembelian kembali saham, dan rekayasa neraca daripada investasi produktif, kualitas kerja, atau inovasi jangka panjang. Penerima manfaat biasanya terkonsentrasi dan mempunyai insentif kuat untuk mengorganisasi diri, sedangkan biaya sering tersebar pada jutaan warga atau baru tampak pada masa depan. Asimetri tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang secara agregat merugikan dapat bertahan lama. Kelompok terorganisasi memiliki staf, data, waktu, jaringan hukum, dan akses media; warga biasa menghadapi biaya informasi serta koordinasi. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara belum otomatis menghasilkan pengaruh yang setara. Demokrasi memerlukan infrastruktur partisipasi yang mengurangi biaya kolektif dan menjamin bahwa pihak terdampak dapat memasuki proses kebijakan.

Secara analitis, utang memperluas akses sekaligus menciptakan disiplin; rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah yang sangat berutang memiliki ruang lebih sempit untuk menolak syarat kreditur. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Lukes (2005) bahwa kekuasaan bekerja dalam keputusan, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi. Ia juga berhubungan dengan konsep ketergantungan struktural negara pada investasi: bahkan tanpa instruksi langsung, pembuat kebijakan mengantisipasi reaksi pasar, peringkat kredit, atau keputusan perusahaan. Antisipasi dapat rasional, tetapi menjadi problematis bila satu jenis risiko—misalnya turunnya kepercayaan investor—selalu diprioritaskan dibanding risiko pengangguran, kemiskinan, hilangnya ruang hidup, atau kerusakan ekologis. Audit kebijakan karenanya harus memeriksa risiko siapa yang dihitung dan siapa yang tidak terlihat.

Sebuah ilustrasi relevan adalah kebijakan makroprudensial, tata kelola korporasi, perlindungan konsumen, pembiayaan pembangunan, dan aturan insolvensi karena itu merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan output atau kecepatan realisasi. Penilaian perlu mencakup additionality, distribusi manfaat, kualitas pekerjaan, ketahanan fiskal, dampak lingkungan, hak komunitas, dan kemampuan belajar. Kebijakan yang menghasilkan investasi besar tetapi menciptakan monopoli,

ketergantungan teknologi, atau biaya pemulihan publik mungkin tampak berhasil dalam jangka pendek namun rapuh secara institusional. Sebaliknya, prosedur yang lebih deliberatif dapat memerlukan waktu, tetapi meningkatkan informasi lokal, legitimasi, dan kepatuhan.

Implikasi kelembagaannya adalah perlunya kombinasi antara batas, penyeimbang, dan kapasitas. Batas mencegah konsentrasi melalui aturan persaingan, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik. Penyeimbang memperkuat serikat pekerja, organisasi warga, jurnalisme, akademika, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan. Kapasitas memberi negara tenaga ahli, sistem data, anggaran, serta kesinambungan organisasi untuk bertindak independen. Ketiganya saling bergantung. Larangan tanpa kapasitas mudah menjadi simbolik; kapasitas tanpa pengawasan dapat represif; partisipasi tanpa informasi dan tindak lanjut berubah menjadi ritual konsultasi.

Dengan demikian, ukuran normatif yang tepat bukan ketiadaan kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diperebutkan secara damai. Institusi yang demokratis tidak menjanjikan keputusan sempurna, tetapi menyediakan kemungkinan untuk mengetahui kesalahan, mengganti pemimpin, memperbaiki aturan, dan memberi pemulihan. Prinsip ini relevan bagi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi internasional. Setiap pusat keputusan yang mampu memengaruhi kehidupan publik perlu tunduk pada kewajiban penjelasan, pemeriksaan independen, partisipasi pihak terdampak, serta sanksi yang proporsional. Tanpa itu, efisiensi mudah menjadi nama lain bagi pemindahan biaya kepada mereka yang paling lemah.

9. Platform Digital, Data, dan Kecerdasan Artifisial

Gagasan utama bagian ini ialah bahwa platform digital menggabungkan kekuatan pasar, kekuatan informasi, dan kekuatan infrastruktur karena mereka sekaligus menjadi perantara, pembuat aturan, pengumpul data, dan pesaing di ruang yang dikelola sendiri. Dalam analisis ekonomi politik, hasil sosial tidak cukup diterangkan oleh preferensi individual atau efisiensi pasar. Hasil tersebut lahir dari aturan kepemilikan, kapasitas organisasi, sejarah institusi, dan distribusi daya tawar. Karena itu, kebijakan publik harus dibaca sebagai tindakan substantif sekaligus simbolik: ia mengalokasikan sumber daya, menetapkan kategori yang sah, dan menyampaikan siapa yang dianggap layak dibantu. Cara pandang ini tidak menolak pengetahuan teknis. Sebaliknya, ia menempatkan teknik di dalam proses demokratis agar asumsi, ketidakpastian, dan konsekuensi distribusionalnya dapat diuji secara terbuka.

Mekanisme yang penting terlihat pada kenyataan bahwa efek jaringan, skala komputasi, akumulasi data, integrasi ekosistem, dan biaya perpindahan dapat menghasilkan posisi dominan yang sulit ditantang oleh pendatang baru. Penerima manfaat biasanya terkonsentrasi dan mempunyai insentif kuat untuk mengorganisasi diri, sedangkan biaya sering tersebar pada jutaan warga atau baru tampak pada masa depan. Asimetri tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang secara agregat merugikan dapat bertahan lama. Kelompok terorganisasi memiliki staf, data, waktu, jaringan hukum, dan akses media; warga biasa menghadapi biaya informasi serta koordinasi. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara belum otomatis menghasilkan pengaruh yang setara. Demokrasi memerlukan infrastruktur partisipasi yang mengurangi biaya kolektif dan menjamin bahwa pihak terdampak dapat memasuki proses kebijakan.

Secara analitis, AI memperluas kapasitas prediksi dan otomasi, tetapi juga memungkinkan diskriminasi terselubung, pengawasan pekerja, manipulasi perhatian, dan pengambilan keputusan yang sukar dijelaskan. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Lukes (2005) bahwa kekuasaan bekerja dalam keputusan, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi. Ia juga berhubungan dengan konsep ketergantungan struktural negara pada investasi: bahkan tanpa instruksi langsung, pembuat kebijakan mengantisipasi reaksi pasar, peringkat kredit, atau keputusan perusahaan. Antisipasi dapat rasional, tetapi menjadi problematis bila satu jenis risiko—misalnya turunnya kepercayaan investor—selalu diprioritaskan dibanding risiko pengangguran, kemiskinan, hilangnya ruang hidup, atau kerusakan ekologis. Audit kebijakan karenanya harus memeriksa risiko siapa yang dihitung dan siapa yang tidak terlihat.

Sebuah ilustrasi relevan adalah kebijakan digital harus melampaui perlindungan privasi individual menuju tata kelola data, audit algoritmik, interoperabilitas, kompetisi, hak pekerja, keamanan, dan pilihan kolektif tentang penggunaan yang dapat diterima. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan output atau kecepatan realisasi. Penilaian perlu mencakup additionality, distribusi manfaat, kualitas pekerjaan, ketahanan fiskal, dampak lingkungan, hak komunitas, dan kemampuan belajar. Kebijakan yang menghasilkan investasi besar tetapi menciptakan monopoli, ketergantungan teknologi, atau biaya pemulihan publik mungkin tampak berhasil dalam jangka pendek namun rapuh secara institusional. Sebaliknya, prosedur yang lebih deliberatif dapat memerlukan waktu, tetapi meningkatkan informasi lokal, legitimasi, dan kepatuhan.

Implikasi kelembagaannya adalah perlunya kombinasi antara batas, penyeimbang, dan kapasitas. Batas mencegah konsentrasi melalui aturan persaingan, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik. Penyeimbang memperkuat serikat pekerja, organisasi warga, jurnalisme, akademika, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan. Kapasitas memberi negara tenaga ahli, sistem data, anggaran, serta kesinambungan organisasi untuk bertindak independen. Ketiganya saling bergantung. Larangan tanpa kapasitas mudah menjadi simbolik; kapasitas tanpa pengawasan dapat represif; partisipasi tanpa informasi dan tindak lanjut berubah menjadi ritual konsultasi.

Dengan demikian, ukuran normatif yang tepat bukan ketiadaan kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diperebutkan secara damai. Institusi yang demokratis tidak menjanjikan keputusan sempurna, tetapi menyediakan kemungkinan untuk mengetahui kesalahan, mengganti pemimpin, memperbaiki aturan, dan memberi pemulihan. Prinsip ini relevan bagi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi internasional. Setiap pusat keputusan yang mampu memengaruhi kehidupan publik perlu tunduk pada kewajiban penjelasan, pemeriksaan independen, partisipasi pihak terdampak, serta sanksi yang proporsional. Tanpa itu, efisiensi mudah menjadi nama lain bagi pemindahan biaya kepada mereka yang paling lemah.

10. Media, Pengetahuan, dan Politik Kebenaran

Gagasan utama bagian ini ialah bahwa kekuasaan kontemporer bergantung pada kemampuan membentuk lingkungan informasi, bukan hanya melarang ucapan; kepemilikan media, iklan, algoritma

rekomendasi, dan industri konsultasi memengaruhi visibilitas masalah. Dalam analisis ekonomi politik, hasil sosial tidak cukup diterangkan oleh preferensi individual atau efisiensi pasar. Hasil tersebut lahir dari aturan kepemilikan, kapasitas organisasi, sejarah institusi, dan distribusi daya tawar. Karena itu, kebijakan publik harus dibaca sebagai tindakan substantif sekaligus simbolik: ia mengalokasikan sumber daya, menetapkan kategori yang sah, dan menyampaikan siapa yang dianggap layak dibantu. Cara pandang ini tidak menolak pengetahuan teknis. Sebaliknya, ia menempatkan teknik di dalam proses demokratis agar asumsi, ketidakpastian, dan konsekuensi distribusionalnya dapat diuji secara terbuka.

Mekanisme yang penting terlihat pada kenyataan bahwa pengetahuan kebijakan diproduksi oleh universitas, lembaga riset, konsultan, asosiasi industri, organisasi masyarakat sipil, dan birokrasi dengan sumber dana serta insentif yang berbeda. Penerima manfaat biasanya terkonsentrasi dan mempunyai insentif kuat untuk mengorganisasi diri, sedangkan biaya sering tersebar pada jutaan warga atau baru tampak pada masa depan. Asimetri tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang secara agregat merugikan dapat bertahan lama. Kelompok terorganisasi memiliki staf, data, waktu, jaringan hukum, dan akses media; warga biasa menghadapi biaya informasi serta koordinasi. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara belum otomatis menghasilkan pengaruh yang setara. Demokrasi memerlukan infrastruktur partisipasi yang mengurangi biaya kolektif dan menjamin bahwa pihak terdampak dapat memasuki proses kebijakan.

Secara analitis, bahasa teknis dapat meningkatkan ketepatan, tetapi juga dapat mendepolitisasi konflik nilai dengan menyajikan pilihan distributif sebagai keharusan ilmiah tunggal. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Lukes (2005) bahwa kekuasaan bekerja dalam keputusan, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi. Ia juga berhubungan dengan konsep ketergantungan struktural negara pada investasi: bahkan tanpa instruksi langsung, pembuat kebijakan mengantisipasi reaksi pasar, peringkat kredit, atau keputusan perusahaan. Antisipasi dapat rasional, tetapi menjadi problematis bila satu jenis risiko—misalnya turunnya kepercayaan investor—selalu diprioritaskan dibanding risiko pengangguran, kemiskinan, hilangnya ruang hidup, atau kerusakan ekologis. Audit kebijakan karenanya harus memeriksa risiko siapa yang dihitung dan siapa yang tidak terlihat.

Sebuah ilustrasi relevan adalah ekosistem pengetahuan yang sehat membutuhkan kebebasan akademik, transparansi pendanaan, akses data, pluralitas metodologis, literasi publik, dan mekanisme koreksi terhadap disinformasi. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan output atau kecepatan realisasi. Penilaian perlu mencakup additionality, distribusi manfaat, kualitas pekerjaan, ketahanan fiskal, dampak lingkungan, hak komunitas, dan kemampuan belajar. Kebijakan yang menghasilkan investasi besar tetapi menciptakan monopoli, ketergantungan teknologi, atau biaya pemulihan publik mungkin tampak berhasil dalam jangka pendek namun rapuh secara institusional. Sebaliknya, prosedur yang lebih deliberatif dapat memerlukan waktu, tetapi meningkatkan informasi lokal, legitimasi, dan kepatuhan.

Implikasi kelembagaannya adalah perlunya kombinasi antara batas, penyeimbang, dan kapasitas. Batas mencegah konsentrasi melalui aturan persaingan, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik. Penyeimbang memperkuat serikat pekerja, organisasi warga, jurnalisme, akademika, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan. Kapasitas memberi negara tenaga ahli, sistem data, anggaran, serta

kesinambungan organisasi untuk bertindak independen. Ketiganya saling bergantung. Larangan tanpa kapasitas mudah menjadi simbolik; kapasitas tanpa pengawasan dapat represif; partisipasi tanpa informasi dan tindak lanjut berubah menjadi ritual konsultasi.

Dengan demikian, ukuran normatif yang tepat bukan ketiadaan kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diperebutkan secara damai. Institusi yang demokratis tidak menjanjikan keputusan sempurna, tetapi menyediakan kemungkinan untuk mengetahui kesalahan, mengganti pemimpin, memperbaiki aturan, dan memberi pemulihan. Prinsip ini relevan bagi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi internasional. Setiap pusat keputusan yang mampu memengaruhi kehidupan publik perlu tunduk pada kewajiban penjelasan, pemeriksaan independen, partisipasi pihak terdampak, serta sanksi yang proporsional. Tanpa itu, efisiensi mudah menjadi nama lain bagi pemindahan biaya kepada mereka yang paling lemah.

11. Krisis Iklim, Ekstraktivisme, dan Transisi Energi

Gagasan utama bagian ini ialah bahwa krisis iklim memperlihatkan benturan tajam antara akumulasi jangka pendek dan batas ekologis, sementara dampaknya ditanggung tidak proporsional oleh komunitas yang kontribusi emisinya lebih kecil. Dalam analisis ekonomi politik, hasil sosial tidak cukup diterangkan oleh preferensi individual atau efisiensi pasar. Hasil tersebut lahir dari aturan kepemilikan, kapasitas organisasi, sejarah institusi, dan distribusi daya tawar. Karena itu, kebijakan publik harus dibaca sebagai tindakan substantif sekaligus simbolik: ia mengalokasikan sumber daya, menetapkan kategori yang sah, dan menyampaikan siapa yang dianggap layak dibantu. Cara pandang ini tidak menolak pengetahuan teknis. Sebaliknya, ia menempatkan teknik di dalam proses demokratis agar asumsi, ketidakpastian, dan konsekuensi distribusionalnya dapat diuji secara terbuka.

Mekanisme yang penting terlihat pada kenyataan bahwa ekstraktivisme bertahan melalui pertautan konsesi, penerimaan negara, pekerjaan lokal, pembiayaan politik, kebutuhan devisa, dan narasi pembangunan nasional. Penerima manfaat biasanya terkonsentrasi dan mempunyai insentif kuat untuk mengorganisasi diri, sedangkan biaya sering tersebar pada jutaan warga atau baru tampak pada masa depan. Asimetri tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang secara agregat merugikan dapat bertahan lama. Kelompok terorganisasi memiliki staf, data, waktu, jaringan hukum, dan akses media; warga biasa menghadapi biaya informasi serta koordinasi. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara belum otomatis menghasilkan pengaruh yang setara. Demokrasi memerlukan infrastruktur partisipasi yang mengurangi biaya kolektif dan menjamin bahwa pihak terdampak dapat memasuki proses kebijakan.

Secara analitis, transisi energi sendiri dapat ditangkap menjadi proyek akumulasi baru apabila mineral kritis, lahan, subsidi hijau, dan infrastruktur dikelola tanpa hak masyarakat serta akuntabilitas. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Lukes (2005) bahwa kekuasaan bekerja dalam keputusan, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi. Ia juga berhubungan dengan konsep ketergantungan struktural negara pada investasi: bahkan tanpa instruksi langsung, pembuat kebijakan mengantisipasi reaksi pasar, peringkat kredit, atau keputusan perusahaan. Antisipasi dapat rasional, tetapi menjadi problematis bila satu jenis risiko—misalnya turunnya kepercayaan investor—selalu diprioritaskan dibanding risiko

pengangguran, kemiskinan, hilangnya ruang hidup, atau kerusakan ekologis. Audit kebijakan karenanya harus memeriksa risiko siapa yang dihitung dan siapa yang tidak terlihat.

Sebuah ilustrasi relevan adalah transisi yang adil menuntut dekarbonisasi, pekerjaan layak, diversifikasi daerah, perlindungan sosial, konsultasi bermakna, pemulihan ekologis, dan pembagian manfaat yang transparan. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan output atau kecepatan realisasi. Penilaian perlu mencakup additionality, distribusi manfaat, kualitas pekerjaan, ketahanan fiskal, dampak lingkungan, hak komunitas, dan kemampuan belajar. Kebijakan yang menghasilkan investasi besar tetapi menciptakan monopoli, ketergantungan teknologi, atau biaya pemulihan publik mungkin tampak berhasil dalam jangka pendek namun rapuh secara institusional. Sebaliknya, prosedur yang lebih deliberatif dapat memerlukan waktu, tetapi meningkatkan informasi lokal, legitimasi, dan kepatuhan.

Implikasi kelembagaannya adalah perlunya kombinasi antara batas, penyeimbang, dan kapasitas. Batas mencegah konsentrasi melalui aturan persaingan, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik. Penyeimbang memperkuat serikat pekerja, organisasi warga, jurnalisme, akademika, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan. Kapasitas memberi negara tenaga ahli, sistem data, anggaran, serta kesinambungan organisasi untuk bertindak independen. Ketiganya saling bergantung. Larangan tanpa kapasitas mudah menjadi simbolik; kapasitas tanpa pengawasan dapat represif; partisipasi tanpa informasi dan tindak lanjut berubah menjadi ritual konsultasi.

Dengan demikian, ukuran normatif yang tepat bukan ketiadaan kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diperebutkan secara damai. Institusi yang demokratis tidak menjanjikan keputusan sempurna, tetapi menyediakan kemungkinan untuk mengetahui kesalahan, mengganti pemimpin, memperbaiki aturan, dan memberi pemulihan. Prinsip ini relevan bagi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi internasional. Setiap pusat keputusan yang mampu memengaruhi kehidupan publik perlu tunduk pada kewajiban penjelasan, pemeriksaan independen, partisipasi pihak terdampak, serta sanksi yang proporsional. Tanpa itu, efisiensi mudah menjadi nama lain bagi pemindahan biaya kepada mereka yang paling lemah.

12. Global South, Ruang Kebijakan, dan Tata Kelola Global

Gagasan utama bagian ini ialah bahwa negara Global South menjalankan kebijakan dalam struktur internasional yang dibentuk oleh utang, perdagangan, investasi, hak kekayaan intelektual, standar teknologi, dan kekuatan mata uang utama. Dalam analisis ekonomi politik, hasil sosial tidak cukup diterangkan oleh preferensi individual atau efisiensi pasar. Hasil tersebut lahir dari aturan kepemilikan, kapasitas organisasi, sejarah institusi, dan distribusi daya tawar. Karena itu, kebijakan publik harus dibaca sebagai tindakan substantif sekaligus simbolik: ia mengalokasikan sumber daya, menetapkan kategori yang sah, dan menyampaikan siapa yang dianggap layak dibantu. Cara pandang ini tidak menolak pengetahuan teknis. Sebaliknya, ia menempatkan teknik di dalam proses demokratis agar asumsi, ketidakpastian, dan konsekuensi distribusionalnya dapat diuji secara terbuka.

Mekanisme yang penting terlihat pada kenyataan bahwa ruang kebijakan menyempit ketika penyesuaian fiskal atau perlindungan investor membatasi eksperimen pembangunan, namun ruang itu juga dipengaruhi oleh kualitas institusi domestik dan koalisi elite. Penerima manfaat biasanya terkonsentrasi dan mempunyai insentif kuat untuk mengorganisasi diri, sedangkan biaya sering tersebar pada jutaan warga atau baru tampak pada masa depan. Asimetri tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang secara agregat merugikan dapat bertahan lama. Kelompok terorganisasi memiliki staf, data, waktu, jaringan hukum, dan akses media; warga biasa menghadapi biaya informasi serta koordinasi. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara belum otomatis menghasilkan pengaruh yang setara. Demokrasi memerlukan infrastruktur partisipasi yang mengurangi biaya kolektif dan menjamin bahwa pihak terdampak dapat memasuki proses kebijakan.

Secara analitis, kritik terhadap ketimpangan global tidak boleh menjadi alasan bagi elite nasional untuk menghindari akuntabilitas; tekanan eksternal dan relasi kekuasaan domestik sering saling memperkuat. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Lukes (2005) bahwa kekuasaan bekerja dalam keputusan, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi. Ia juga berhubungan dengan konsep ketergantungan struktural negara pada investasi: bahkan tanpa instruksi langsung, pembuat kebijakan mengantisipasi reaksi pasar, peringkat kredit, atau keputusan perusahaan. Antisipasi dapat rasional, tetapi menjadi problematis bila satu jenis risiko—misalnya turunnya kepercayaan investor—selalu diprioritaskan dibanding risiko pengangguran, kemiskinan, hilangnya ruang hidup, atau kerusakan ekologis. Audit kebijakan karenanya harus memeriksa risiko siapa yang dihitung dan siapa yang tidak terlihat.

Sebuah ilustrasi relevan adalah kerja sama Selatan–Selatan, reformasi perpajakan internasional, restrukturisasi utang, transfer teknologi, dan pembiayaan iklim perlu disertai standar keterbukaan serta perlindungan hak. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan output atau kecepatan realisasi. Penilaian perlu mencakup additionality, distribusi manfaat, kualitas pekerjaan, ketahanan fiskal, dampak lingkungan, hak komunitas, dan kemampuan belajar. Kebijakan yang menghasilkan investasi besar tetapi menciptakan monopoli, ketergantungan teknologi, atau biaya pemulihan publik mungkin tampak berhasil dalam jangka pendek namun rapuh secara institusional. Sebaliknya, prosedur yang lebih deliberatif dapat memerlukan waktu, tetapi meningkatkan informasi lokal, legitimasi, dan kepatuhan.

Implikasi kelembagaannya adalah perlunya kombinasi antara batas, penyeimbang, dan kapasitas. Batas mencegah konsentrasi melalui aturan persaingan, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik. Penyeimbang memperkuat serikat pekerja, organisasi warga, jurnalisme, akademika, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan. Kapasitas memberi negara tenaga ahli, sistem data, anggaran, serta kesinambungan organisasi untuk bertindak independen. Ketiganya saling bergantung. Larangan tanpa kapasitas mudah menjadi simbolik; kapasitas tanpa pengawasan dapat represif; partisipasi tanpa informasi dan tindak lanjut berubah menjadi ritual konsultasi.

Dengan demikian, ukuran normatif yang tepat bukan ketiadaan kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diperebutkan secara damai. Institusi yang demokratis tidak menjanjikan keputusan sempurna, tetapi menyediakan kemungkinan untuk mengetahui kesalahan, mengganti pemimpin, memperbaiki aturan, dan memberi pemulihan. Prinsip ini relevan bagi

pemerintahan, perusahaan, dan organisasi internasional. Setiap pusat keputusan yang mampu memengaruhi kehidupan publik perlu tunduk pada kewajiban penjelasan, pemeriksaan independen, partisipasi pihak terdampak, serta sanksi yang proporsional. Tanpa itu, efisiensi mudah menjadi nama lain bagi pemindahan biaya kepada mereka yang paling lemah.

13. Indonesia: Demokratisasi, Desentralisasi, dan Politik Pembangunan

Gagasan utama bagian ini ialah bahwa Indonesia menawarkan kasus penting tentang demokratisasi yang berjalan bersama desentralisasi, ekspansi komoditas, pertumbuhan kelas menengah, konsolidasi bisnis besar, dan transformasi digital. Dalam analisis ekonomi politik, hasil sosial tidak cukup diterangkan oleh preferensi individual atau efisiensi pasar. Hasil tersebut lahir dari aturan kepemilikan, kapasitas organisasi, sejarah institusi, dan distribusi daya tawar. Karena itu, kebijakan publik harus dibaca sebagai tindakan substantif sekaligus simbolik: ia mengalokasikan sumber daya, menetapkan kategori yang sah, dan menyampaikan siapa yang dianggap layak dibantu. Cara pandang ini tidak menolak pengetahuan teknis. Sebaliknya, ia menempatkan teknik di dalam proses demokratis agar asumsi, ketidakpastian, dan konsekuensi distribusionalnya dapat diuji secara terbuka.

Mekanisme yang penting terlihat pada kenyataan bahwa desentralisasi membuka partisipasi dan inovasi daerah, tetapi juga memindahkan sebagian arena rente, perizinan, dinasti politik, dan persaingan sumber daya ke tingkat lokal. Penerima manfaat biasanya terkonsentrasi dan mempunyai insentif kuat untuk mengorganisasi diri, sedangkan biaya sering tersebar pada jutaan warga atau baru tampak pada masa depan. Asimetri tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang secara agregat merugikan dapat bertahan lama. Kelompok terorganisasi memiliki staf, data, waktu, jaringan hukum, dan akses media; warga biasa menghadapi biaya informasi serta koordinasi. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara belum otomatis menghasilkan pengaruh yang setara. Demokrasi memerlukan infrastruktur partisipasi yang mengurangi biaya kolektif dan menjamin bahwa pihak terdampak dapat memasuki proses kebijakan.

Secara analitis, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan transisi energi dapat meningkatkan kapasitas nasional, namun kualitasnya ditentukan oleh disiplin kinerja, kompetisi yang sehat, perlindungan sosial, serta biaya ekologis. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Lukes (2005) bahwa kekuasaan bekerja dalam keputusan, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi. Ia juga berhubungan dengan konsep ketergantungan struktural negara pada investasi: bahkan tanpa instruksi langsung, pembuat kebijakan mengantisipasi reaksi pasar, peringkat kredit, atau keputusan perusahaan. Antisipasi dapat rasional, tetapi menjadi problematis bila satu jenis risiko—misalnya turunnya kepercayaan investor—selalu diprioritaskan dibanding risiko pengangguran, kemiskinan, hilangnya ruang hidup, atau kerusakan ekologis. Audit kebijakan karenanya harus memeriksa risiko siapa yang dihitung dan siapa yang tidak terlihat.

Sebuah ilustrasi relevan adalah agenda Indonesia bukan memilih negara atau pasar secara abstrak, melainkan membangun negara demokratis yang mampu mengarahkan pasar, mendisiplinkan rente, dan memperluas kapabilitas warga. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan output atau kecepatan realisasi. Penilaian perlu mencakup

additionality, distribusi manfaat, kualitas pekerjaan, ketahanan fiskal, dampak lingkungan, hak komunitas, dan kemampuan belajar. Kebijakan yang menghasilkan investasi besar tetapi menciptakan monopoli, ketergantungan teknologi, atau biaya pemulihan publik mungkin tampak berhasil dalam jangka pendek namun rapuh secara institusional. Sebaliknya, prosedur yang lebih deliberatif dapat memerlukan waktu, tetapi meningkatkan informasi lokal, legitimasi, dan kepatuhan.

Implikasi kelembagaannya adalah perlunya kombinasi antara batas, penyeimbang, dan kapasitas. Batas mencegah konsentrasi melalui aturan persaingan, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik. Penyeimbang memperkuat serikat pekerja, organisasi warga, jurnalisme, akademika, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan. Kapasitas memberi negara tenaga ahli, sistem data, anggaran, serta kesinambungan organisasi untuk bertindak independen. Ketiganya saling bergantung. Larangan tanpa kapasitas mudah menjadi simbolik; kapasitas tanpa pengawasan dapat represif; partisipasi tanpa informasi dan tindak lanjut berubah menjadi ritual konsultasi.

Dengan demikian, ukuran normatif yang tepat bukan ketiadaan kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diperebutkan secara damai. Institusi yang demokratis tidak menjanjikan keputusan sempurna, tetapi menyediakan kemungkinan untuk mengetahui kesalahan, mengganti pemimpin, memperbaiki aturan, dan memberi pemulihan. Prinsip ini relevan bagi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi internasional. Setiap pusat keputusan yang mampu memengaruhi kehidupan publik perlu tunduk pada kewajiban penjelasan, pemeriksaan independen, partisipasi pihak terdampak, serta sanksi yang proporsional. Tanpa itu, efisiensi mudah menjadi nama lain bagi pemindahan biaya kepada mereka yang paling lemah.

14. Dampak terhadap Manajemen dan Tata Kelola Organisasi

Gagasan utama bagian ini ialah bahwa perusahaan bukan hanya objek kebijakan, tetapi aktor politik yang keputusan investasinya, rantai pasoknya, standar kerjanya, dan komunikasinya memiliki konsekuensi publik. Dalam analisis ekonomi politik, hasil sosial tidak cukup diterangkan oleh preferensi individual atau efisiensi pasar. Hasil tersebut lahir dari aturan kepemilikan, kapasitas organisasi, sejarah institusi, dan distribusi daya tawar. Karena itu, kebijakan publik harus dibaca sebagai tindakan substantif sekaligus simbolik: ia mengalokasikan sumber daya, menetapkan kategori yang sah, dan menyampaikan siapa yang dianggap layak dibantu. Cara pandang ini tidak menolak pengetahuan teknis. Sebaliknya, ia menempatkan teknik di dalam proses demokratis agar asumsi, ketidakpastian, dan konsekuensi distribusionalnya dapat diuji secara terbuka.

Mekanisme yang penting terlihat pada kenyataan bahwa konsep stakeholder perlu diterjemahkan dari retorika menjadi hak informasi, mekanisme keluhan, partisipasi pekerja, uji tuntas hak asasi, target iklim, dan akuntabilitas dewan. Penerima manfaat biasanya terkonsentrasi dan mempunyai insentif kuat untuk mengorganisasi diri, sedangkan biaya sering tersebar pada jutaan warga atau baru tampak pada masa depan. Asimetri tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang secara agregat merugikan dapat bertahan lama. Kelompok terorganisasi memiliki staf, data, waktu, jaringan hukum, dan akses media; warga biasa menghadapi biaya informasi serta koordinasi. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara belum

otomatis menghasilkan pengaruh yang setara. Demokrasi memerlukan infrastruktur partisipasi yang mengurangi biaya kolektif dan menjamin bahwa pihak terdampak dapat memasuki proses kebijakan.

Secara analitis, manajer menghadapi ketegangan antara target finansial, kepatuhan, reputasi, inovasi, dan tanggung jawab sosial; keputusan etis memerlukan penilaian terhadap pihak yang tidak memiliki daya tawar. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Lukes (2005) bahwa kekuasaan bekerja dalam keputusan, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi. Ia juga berhubungan dengan konsep ketergantungan struktural negara pada investasi: bahkan tanpa instruksi langsung, pembuat kebijakan mengantisipasi reaksi pasar, peringkat kredit, atau keputusan perusahaan. Antisipasi dapat rasional, tetapi menjadi problematis bila satu jenis risiko—misalnya turunnya kepercayaan investor—selalu diprioritaskan dibanding risiko pengangguran, kemiskinan, hilangnya ruang hidup, atau kerusakan ekologis. Audit kebijakan karenanya harus memeriksa risiko siapa yang dihitung dan siapa yang tidak terlihat.

Sebuah ilustrasi relevan adalah tata kelola yang bertanggung jawab memandang regulasi bukan hambatan eksternal semata, melainkan infrastruktur kepercayaan yang menjaga legitimasi pasar dan keberlanjutan organisasi. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan output atau kecepatan realisasi. Penilaian perlu mencakup additionality, distribusi manfaat, kualitas pekerjaan, ketahanan fiskal, dampak lingkungan, hak komunitas, dan kemampuan belajar. Kebijakan yang menghasilkan investasi besar tetapi menciptakan monopoli, ketergantungan teknologi, atau biaya pemulihan publik mungkin tampak berhasil dalam jangka pendek namun rapuh secara institusional. Sebaliknya, prosedur yang lebih deliberatif dapat memerlukan waktu, tetapi meningkatkan informasi lokal, legitimasi, dan kepatuhan.

Implikasi kelembagaannya adalah perlunya kombinasi antara batas, penyeimbang, dan kapasitas. Batas mencegah konsentrasi melalui aturan persaingan, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik. Penyeimbang memperkuat serikat pekerja, organisasi warga, jurnalisme, akademika, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan. Kapasitas memberi negara tenaga ahli, sistem data, anggaran, serta kesinambungan organisasi untuk bertindak independen. Ketiganya saling bergantung. Larangan tanpa kapasitas mudah menjadi simbolik; kapasitas tanpa pengawasan dapat represif; partisipasi tanpa informasi dan tindak lanjut berubah menjadi ritual konsultasi.

Dengan demikian, ukuran normatif yang tepat bukan ketiadaan kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diperebutkan secara damai. Institusi yang demokratis tidak menjanjikan keputusan sempurna, tetapi menyediakan kemungkinan untuk mengetahui kesalahan, mengganti pemimpin, memperbaiki aturan, dan memberi pemulihan. Prinsip ini relevan bagi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi internasional. Setiap pusat keputusan yang mampu memengaruhi kehidupan publik perlu tunduk pada kewajiban penjelasan, pemeriksaan independen, partisipasi pihak terdampak, serta sanksi yang proporsional. Tanpa itu, efisiensi mudah menjadi nama lain bagi pemindahan biaya kepada mereka yang paling lemah.

15. Agenda Reformasi: Demokratisasi Negara dan Ekonomi

Gagasan utama bagian ini ialah bahwa reformasi perlu menggabungkan integritas politik, kapasitas negara, kompetisi ekonomi, keadilan distributif, dan demokrasi partisipatif karena perbaikan tunggal mudah dipindahkan atau ditangkap. Dalam analisis ekonomi politik, hasil sosial tidak cukup diterangkan oleh preferensi individual atau efisiensi pasar. Hasil tersebut lahir dari aturan kepemilikan, kapasitas organisasi, sejarah institusi, dan distribusi daya tawar. Karena itu, kebijakan publik harus dibaca sebagai tindakan substantif sekaligus simbolik: ia mengalokasikan sumber daya, menetapkan kategori yang sah, dan menyampaikan siapa yang dianggap layak dibantu. Cara pandang ini tidak menolak pengetahuan teknis. Sebaliknya, ia menempatkan teknik di dalam proses demokratis agar asumsi, ketidakpastian, dan konsekuensi distribusionalnya dapat diuji secara terbuka.

Mekanisme yang penting terlihat pada kenyataan bahwa transparansi pembiayaan politik, pengadaan terbuka, registrasi pemilik manfaat, perlindungan pelapor, peradilan independen, dan penegakan persaingan merupakan fondasi minimum. Penerima manfaat biasanya terkonsentrasi dan mempunyai insentif kuat untuk mengorganisasi diri, sedangkan biaya sering tersebar pada jutaan warga atau baru tampak pada masa depan. Asimetri tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang secara agregat merugikan dapat bertahan lama. Kelompok terorganisasi memiliki staf, data, waktu, jaringan hukum, dan akses media; warga biasa menghadapi biaya informasi serta koordinasi. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara belum otomatis menghasilkan pengaruh yang setara. Demokrasi memerlukan infrastruktur partisipasi yang mengurangi biaya kolektif dan menjamin bahwa pihak terdampak dapat memasuki proses kebijakan.

Secara analitis, pajak progresif, layanan publik universal, perlindungan sosial adaptif, organisasi pekerja, dukungan usaha kecil, dan kebijakan industri berbasis misi dapat menyebarkan sumber daya kekuasaan. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Lukes (2005) bahwa kekuasaan bekerja dalam keputusan, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi. Ia juga berhubungan dengan konsep ketergantungan struktural negara pada investasi: bahkan tanpa instruksi langsung, pembuat kebijakan mengantisipasi reaksi pasar, peringkat kredit, atau keputusan perusahaan. Antisipasi dapat rasional, tetapi menjadi problematis bila satu jenis risiko—misalnya turunnya kepercayaan investor—selalu diprioritaskan dibanding risiko pengangguran, kemiskinan, hilangnya ruang hidup, atau kerusakan ekologis. Audit kebijakan karenanya harus memeriksa risiko siapa yang dihitung dan siapa yang tidak terlihat.

Sebuah ilustrasi relevan adalah partisipasi harus berlangsung sejak pembingkaiian masalah hingga evaluasi, dilengkapi data terbuka, alasan keputusan, mekanisme banding, dan perhatian khusus terhadap kelompok yang terdampak. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan output atau kecepatan realisasi. Penilaian perlu mencakup additionality, distribusi manfaat, kualitas pekerjaan, ketahanan fiskal, dampak lingkungan, hak komunitas, dan kemampuan belajar. Kebijakan yang menghasilkan investasi besar tetapi menciptakan monopoli, ketergantungan teknologi, atau biaya pemulihan publik mungkin tampak berhasil dalam jangka pendek namun rapuh secara institusional. Sebaliknya, prosedur yang lebih deliberatif dapat memerlukan waktu, tetapi meningkatkan informasi lokal, legitimasi, dan kepatuhan.

Implikasi kelembagaannya adalah perlunya kombinasi antara batas, penyeimbang, dan kapasitas. Batas mencegah konsentrasi melalui aturan persaingan, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik. Penyeimbang memperkuat serikat pekerja, organisasi warga, jurnalisme, akademika, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan. Kapasitas memberi negara tenaga ahli, sistem data, anggaran, serta kesinambungan organisasi untuk bertindak independen. Ketiganya saling bergantung. Larangan tanpa kapasitas mudah menjadi simbolik; kapasitas tanpa pengawasan dapat represif; partisipasi tanpa informasi dan tindak lanjut berubah menjadi ritual konsultasi.

Dengan demikian, ukuran normatif yang tepat bukan ketiadaan kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diperebutkan secara damai. Institusi yang demokratis tidak menjanjikan keputusan sempurna, tetapi menyediakan kemungkinan untuk mengetahui kesalahan, mengganti pemimpin, memperbaiki aturan, dan memberi pemulihan. Prinsip ini relevan bagi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi internasional. Setiap pusat keputusan yang mampu memengaruhi kehidupan publik perlu tunduk pada kewajiban penjelasan, pemeriksaan independen, partisipasi pihak terdampak, serta sanksi yang proporsional. Tanpa itu, efisiensi mudah menjadi nama lain bagi pemindahan biaya kepada mereka yang paling lemah.

16. Penutup: Menuju Kebijakan Publik yang Berkeadilan

Gagasan utama bagian ini ialah bahwa hubungan kekuasaan dan kapital tidak dapat dihapus dari kebijakan publik, tetapi dapat dibuat terlihat, diperdebatkan, dibatasi, dan diarahkan melalui institusi demokratis. Dalam analisis ekonomi politik, hasil sosial tidak cukup diterangkan oleh preferensi individual atau efisiensi pasar. Hasil tersebut lahir dari aturan kepemilikan, kapasitas organisasi, sejarah institusi, dan distribusi daya tawar. Karena itu, kebijakan publik harus dibaca sebagai tindakan substantif sekaligus simbolik: ia mengalokasikan sumber daya, menetapkan kategori yang sah, dan menyampaikan siapa yang dianggap layak dibantu. Cara pandang ini tidak menolak pengetahuan teknis. Sebaliknya, ia menempatkan teknik di dalam proses demokratis agar asumsi, ketidakpastian, dan konsekuensi distribusionalnya dapat diuji secara terbuka.

Mekanisme yang penting terlihat pada kenyataan bahwa kebijakan yang baik bukan hanya efisien menurut model, melainkan sah, dapat dipertanggungjawabkan, adaptif, berkeadilan, dan menjaga kemampuan generasi mendatang. Penerima manfaat biasanya terkonsentrasi dan mempunyai insentif kuat untuk mengorganisasi diri, sedangkan biaya sering tersebar pada jutaan warga atau baru tampak pada masa depan. Asimetri tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang secara agregat merugikan dapat bertahan lama. Kelompok terorganisasi memiliki staf, data, waktu, jaringan hukum, dan akses media; warga biasa menghadapi biaya informasi serta koordinasi. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara belum otomatis menghasilkan pengaruh yang setara. Demokrasi memerlukan infrastruktur partisipasi yang mengurangi biaya kolektif dan menjamin bahwa pihak terdampak dapat memasuki proses kebijakan.

Secara analitis, optimisme institusional diperlukan tanpa naivitas: aturan dapat ditangkap, namun masyarakat juga dapat membangun koalisi, pengetahuan, organisasi, dan norma baru. Pernyataan ini

sejalan dengan pandangan Lukes (2005) bahwa kekuasaan bekerja dalam keputusan, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi. Ia juga berhubungan dengan konsep ketergantungan struktural negara pada investasi: bahkan tanpa instruksi langsung, pembuat kebijakan mengantisipasi reaksi pasar, peringkat kredit, atau keputusan perusahaan. Antisipasi dapat rasional, tetapi menjadi problematis bila satu jenis risiko—misalnya turunnya kepercayaan investor—selalu diprioritaskan dibanding risiko pengangguran, kemiskinan, hilangnya ruang hidup, atau kerusakan ekologis. Audit kebijakan karenanya harus memeriksa risiko siapa yang dihitung dan siapa yang tidak terlihat.

Sebuah ilustrasi relevan adalah masa depan demokrasi bergantung pada kemampuan mengubah warga dari objek kebijakan menjadi subjek yang ikut menentukan tujuan pembangunan dan distribusi risiko. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan output atau kecepatan realisasi. Penilaian perlu mencakup additionality, distribusi manfaat, kualitas pekerjaan, ketahanan fiskal, dampak lingkungan, hak komunitas, dan kemampuan belajar. Kebijakan yang menghasilkan investasi besar tetapi menciptakan monopoli, ketergantungan teknologi, atau biaya pemulihan publik mungkin tampak berhasil dalam jangka pendek namun rapuh secara institusional. Sebaliknya, prosedur yang lebih deliberatif dapat memerlukan waktu, tetapi meningkatkan informasi lokal, legitimasi, dan kepatuhan.

Implikasi kelembagaannya adalah perlunya kombinasi antara batas, penyeimbang, dan kapasitas. Batas mencegah konsentrasi melalui aturan persaingan, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik. Penyeimbang memperkuat serikat pekerja, organisasi warga, jurnalisme, akademika, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan. Kapasitas memberi negara tenaga ahli, sistem data, anggaran, serta kesinambungan organisasi untuk bertindak independen. Ketiganya saling bergantung. Larangan tanpa kapasitas mudah menjadi simbolik; kapasitas tanpa pengawasan dapat represif; partisipasi tanpa informasi dan tindak lanjut berubah menjadi ritual konsultasi.

Dengan demikian, ukuran normatif yang tepat bukan ketiadaan kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diperebutkan secara damai. Institusi yang demokratis tidak menjanjikan keputusan sempurna, tetapi menyediakan kemungkinan untuk mengetahui kesalahan, mengganti pemimpin, memperbaiki aturan, dan memberi pemulihan. Prinsip ini relevan bagi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi internasional. Setiap pusat keputusan yang mampu memengaruhi kehidupan publik perlu tunduk pada kewajiban penjelasan, pemeriksaan independen, partisipasi pihak terdampak, serta sanksi yang proporsional. Tanpa itu, efisiensi mudah menjadi nama lain bagi pemindahan biaya kepada mereka yang paling lemah.

Glossarium

Akumulasi kapital: Proses penambahan dan pemusatan aset produktif serta klaim atas pendapatan masa depan.

Capture: Pembelokan lembaga atau proses publik sehingga secara sistematis menguntungkan kepentingan khusus.

Finansialisasi: Meningkatnya dominasi motif, ukuran, pasar, dan aktor finansial dalam ekonomi serta organisasi.

Hegemoni: Kepemimpinan yang dipertahankan melalui gabungan persetujuan, norma, pengetahuan, dan daya paksa.

Hilirisasi: Peningkatan pengolahan komoditas menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.

Kapasitas negara: Kemampuan lembaga publik menghimpun informasi dan penerimaan, mengoordinasi, melaksanakan, serta belajar.

Kapital: Sumber daya yang dapat diakumulasi dan dikonversi menjadi pendapatan, akses, status, atau pengaruh.

Kekuasaan struktural: Pengaruh yang timbul dari posisi aktor dalam sistem, tanpa memerlukan perintah langsung.

Oligarki: Tatanan ketika aktor yang menguasai kekayaan material sangat besar mampu mempertahankan kekayaan dan pengaruhnya.

Policy feedback: Proses ketika kebijakan yang telah berlaku membentuk sumber daya, identitas, dan politik berikutnya.

Pintu putar: Perpindahan personel antara jabatan regulator dan industri yang diatur, dengan potensi konflik kepentingan.

Rente: Pendapatan yang diperoleh karena kontrol atas kelangkaan, hak istimewa, atau regulasi, bukan tambahan nilai produktif semata.

Ruang kebijakan: Keleluasaan pemerintah memilih instrumen dan arah pembangunan di bawah batas domestik serta internasional.

Teknokrasi: Dominasi pengambilan keputusan oleh ahli atas dasar rasionalitas teknis, sering dengan partisipasi politik terbatas.

Transisi yang adil: Peralihan menuju ekonomi rendah karbon yang sekaligus melindungi pekerja, komunitas, dan kelompok rentan.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. In P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.), *Handbook of economic growth* (Vol. 1A, pp. 385–472). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1574-0684\(05\)01006-3](https://doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01006-3)
- Baldwin, R. (2016). *The great convergence: Information technology and the new globalization*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674660489>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Carpenter, D., & Moss, D. A. (Eds.). (2014). *Preventing regulatory capture: Special interest influence and how to limit it*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139565875>
- Crouch, C. (2004). *Post-democracy*. Polity.
- Culpepper, P. D. (2011). *Quiet politics and business power: Corporate control in Europe and Japan*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511760717>
- Dahl, R. A. (1957). The concept of power. *Behavioral Science*, 2(3), 201–215. <https://doi.org/10.1002/bs.3830020303>
- Evans, P. (1995). *Embedded autonomy: States and industrial transformation*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400821723>
- Fligstein, N., & McAdam, D. (2012). *A theory of fields*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199859948.001.0001>
- Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. *Annual Review of Environment and Resources*, 30, 441–473. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.30.050504.144511>
- Fuchs, D. (2007). *Business power in global governance*. Lynne Rienner Publishers. <https://doi.org/10.1515/9781626372160>
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. International Publishers.
- Hacker, J. S., & Pierson, P. (2010). Winner-take-all politics: Public policy, political organization, and the precipitous rise of top incomes in the United States. *Politics & Society*, 38(2), 152–204. <https://doi.org/10.1177/0032329210365042>
- Hall, P. A., & Soskice, D. (Eds.). (2001). *Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0199247757.001.0001>
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199283262.001.0001>

- Khan, M. H. (2010). Political settlements and the governance of growth-enhancing institutions. SOAS, University of London.
- Krueger, A. O. (1974). The political economy of the rent-seeking society. *American Economic Review*, 64(3), 291–303.
- Lukes, S. (2005). *Power: A radical view* (2nd ed.). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-0-230-80257-5>
- Mazzucato, M. (2018). *The value of everything: Making and taking in the global economy*. PublicAffairs.
- Milanovic, B. (2016). *Global inequality: A new approach for the age of globalization*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674969797>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Olson, M. (1965). *The logic of collective action: Public goods and the theory of groups*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674041660>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Pepinsky, T. B. (2014). The return of the single-country study. *Annual Review of Political Science*, 17, 187–203. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-091911-213314>
- Pierson, P. (1993). When effect becomes cause: Policy feedback and political change. *World Politics*, 45(4), 595–628. <https://doi.org/10.2307/2950710>
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674369542>
- Polanyi, K. (2001). *The great transformation: The political and economic origins of our time*. Beacon Press. (Original work published 1944).
- Rahman, K. S. (2018). The new utilities: Private power, social infrastructure, and the revival of the public utility concept. *Cardozo Law Review*, 39, 1621–1692.
- Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton.
- Schattschneider, E. E. (1960). *The semisovereign people: A realist's view of democracy in America*. Holt, Rinehart and Winston.
- Schulz, N., & Kelsall, T. (2024). The political settlements dataset: Power configurations and their relationship to development. *International Interactions*. <https://doi.org/10.1080/03050629.2024.2352474>
- Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. *Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21. <https://doi.org/10.2307/3003160>

Streeck, W. (2014). *Buying time: The delayed crisis of democratic capitalism*. Verso.

Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511793806>

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. PublicAffairs.